

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- CST Kansil dan Cristine ST Kansil, 2000, *Modul Hukum Perdata Termasuk Azas-Azas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ermin kallo, 2009, *Perspektif Hukum dalam dunia Properti*, Minerva Athena Pressindo, Jakarta.
- John F.C Turner, 1972, *Freedom To Build*, Collier Macmillan, New York.
- M. A. Moergani Djodjodirdjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum Tanggung Gugatan Untuk Kerugian yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan II, Pradya Paramita, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Cetakan VI, Intermasa, Jakarta.
- Sidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Soetalaksana, Tito, 2000, *Rumah dan Fungsinya*, Grafika, Jakarta.
- Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suparno Sastra M. dan Endi Marlina, 2006 *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*, Grafika, Bandung.
- Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan XXIV, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Van Der Tak dalam Aziz Syamsudin, 2011, *Proses dan Teknik Perundang-Undangan*, Sinar Garfika, Jakarta.
- Yodohusodo Siswono, 1991, *Rumah Untuk Rakyat*, Bharakerta, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1983, *azaz-azaz Hukum Perdata*, Sumur, Bandung.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

_____, Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman

_____, Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan kepada pemda.

_____, Indonesia Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

_____, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Pemukiman, 2002.

_____, Departemen Pekerjaan Umum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Standar Kawasan Budi Daya, 2007.

_____, Peraturan Daerah kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.

_____, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

_____, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013 Tentang, Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Oleh Pengembang di Kota Depok.

3. SUMBER INTERNET

Pananggian, [http://Faktor-Faktor Permintaan Rumah.ac.id/](http://Faktor-Faktor_Permintaan_Rumah.ac.id/), Diakses pada 10 Oktober 2015

Sari Zaitun Rahma, <http://Perumahan Cluester .or.id>, Diakses pada 8 Oktober 2015

<http://www.organisasi.org/1970/01/arti-pengertian-fasilitas-umum-dan-fasilitas-sosial-perbedaan-fasum-fasos.html>, Diakses pada 5 Juni 2016.

Oetama, jacob .2012. Wacana Pemberian *Seminar Selamatkan Fasilitas Umum* . http://www.umn.ac.id/home/viewarticel/_seminar_selamatkan_fasilitas_umum. Diakses 5 Juni 2016.

Perpustakaan MB-IPB, <https://core.ac.uk/download/files/479/12354666.pdf>, Diakses pada 5 Juli 2016

Loina LKP, 2010, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Bappenas*, <http://www.scribd.com/doc/51639066/good-governance>, Jakarta, Diakses pada 2 Juli 2016.

Ariasto, anto. 2013. Wacana Pemberian *DPRD: Kualitas Fasilitas Umum Wonogiri Buruk*. <http://www.timlo.net/baca/62276/dprd-kualitas-fasilitas-umum-wonogiri-buruk/>. Diakses pada 6 Juni 2016.

<http://www.depok.go.id/geografis>, Diakses pada 1 Juli 2016

4. JURNAL

Fence M. Wantu, 2007, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol.19 No.3, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.